

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	04.15.4.2.15
Tanggal Pembuatan	16 Maret 2020
Tanggal Revisi	3 Juli 2023
Tanggal Efektif	5 Juli 2023
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

Ir. ZULIA DHARMA Pembina Utama Muda NIP. 19670701 199403 1 016

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nama SOP (PKKPR) PERALATAN DAN PERLENGKAPAN: DASAR HUKUM: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Printer Komputer telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 2 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun internet/wifi 2022 tentang Cipta Kerja 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kamper Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kamper Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perpetengagranan Perizinan Berusaha Repada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Romor 69 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pengadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Romor 86.821.2-420/V/2019 tentang Pengangkatan Pengariah Kabupaten Kampar Nomor 86.821.2-420/V/2019 tentang Pengangkatan Pengariah Kabupaten Kampar Nomor 86.821.2-420/V/2019 tentang Pengangkatan Pengariah Kabupaten Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.				
12 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Rang Wilayah Kabupaten Kampar Hahun 2019-2039 13 Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusiah ank Espada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar 14 Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-420/V/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar 15 Keputusan Bupati Kampar Nomor SG.8236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusiaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar 1 SOP Pada Bidang Penyelenggaraan Perizinan Muda 1 1 SOP Pada Seksi Penata Perizinan Muda 1 1 SOP Pada Seksi Penata Perizinan Muda 1 1 SOP Pada Seksi Penata Perizinan Muda 1 2 SOP Pada Seksi Penata Perizinan Muda 1 3 Memiliki email aktif; Nemaliki email aktif; New Persyaratan Teknis : New	11			
Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039 13 Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar 14 Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-420/V/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar 15 Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Bandar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar 1 SOP Pada Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perzinan 2 SOP Pada Seksi Penata Perizinan Muda 1 Mengajukan permohonan di OSS; NIK KTP Elektronik; Memiliki email aktif; Memiliki email aktif; Memiliki email aktif; Memiliki email aktif; Nomor Handphone WhatsApp; Persyaratan Teknis: NIB dari OSS; NPWP; NP	12			
Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelagaraan Perisinan Berusiaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	12			
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepada Kinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar 14 Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-420/V/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar 15 Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/1/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. KETEKATAN:	13			
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	10			
Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-420/V/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar				
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Keptutusan Bupati Kampar Nomor 503-236/1/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. KETERKAITAN: SOP Pada Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perzinan SOP Pada Seksi Penata Perizinan Muda I Mengajukan permohonan di OSS; NIK KTP Elektronik; Memiliki emal aktif; Nomor Handphone WhatsApp; Persyaratan Teknis: Nomor Handphone WhatsApp; Persyaratan Teknis: SIB dari OSS; Atte Perusahaan; Atte Perusahaan; Data Jumlah Modal Usaha; Data Jumlah Modal Usaha; Data Jumlah Modal Usaha; Data Jumlah Modal Usaha; Persyaratan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); PERNOATAN: KUALIFIKASI PELAKSANA: Memiliki emal pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan Memiliki kemampuan untuk memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat	14			
Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/i/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. PENCATATAN DAN PENDATAAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Persyaratan administrasi) : Pencatana yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) : Pencatana yang dibutuhkan seperti (pencatana yan				
Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. 1 SOP Pada Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perzinan Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) : 2 SOP Pada Seksi Penata Perizinan Muda 1 Mengajukan permohonan di OSS; Nik KTP Elektronik; Nimor Handphone WhatsApp; Persyaratan Teknis : 3 Memiliki email aktif; Nomor Handphone WhatsApp; Persyaratan Teknis : NiB dari OSS; NiB dari O		Pemerintah Kabupaten Kampar		
Periziana Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. KETERKAITAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:	15	Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang		
Periziana Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. KETERKAITAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:		Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan		
RETERAITAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1 SOP Pada Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perzinan Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) : 1 Mengajukan permohonan di OSS; Nik KTP Elektronik; 3 Memiliki email aktif; 4 Nomor Handphone WhatsApp; Persyaratan Teknis : 5 NiB dari OSS; NiB dari OSS; 6 NPWP; 7 Akte Perusahaan; 8 Data Jumlah Modal Usaha; 9 Data jumlah Tenaga Kerja; 10 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 11 Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; 12 Membayar PNBP; 13 Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); PERINGATAN : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan 2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok 2 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat		Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
SOP Pada Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perzinan SOP Pada Seksi Penata Perizinan Muda 1 Mengajukan permohonan di OSS; NE Pelektronik; Memiliki email aktif; Nomor Handphone WhatsApp; Persyaratan Teknis: NIB dari OSS; NIB dari OSS; NPWP; Akte Perusahaan; Bata Jumlah Modal Usaha; Data Jumlah Modal Usaha; Data jumlah Tenaga Kerja; Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; Membayar PNBP; PERINGATAN: Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi): Memiliki email aktif; Nomor Handphone WhatsApp; Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi): Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan dan memiliki tingkat		Kabupaten Kampar.		
SOP Pada Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perzinan SOP Pada Seksi Penata Perizinan Muda 1 Mengajukan permohonan di OSS; NE Pelektronik; Memiliki email aktif; Nomor Handphone WhatsApp; Persyaratan Teknis: NIB dari OSS; NIB dari OSS; NPWP; Akte Perusahaan; Bata Jumlah Modal Usaha; Data Jumlah Modal Usaha; Data jumlah Tenaga Kerja; Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; Membayar PNBP; PERINGATAN: Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi): Memiliki email aktif; Nomor Handphone WhatsApp; Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi): Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan dan memiliki tingkat				
2 SOP Pada Seksi Penata Perizinan Muda 1 Mengajukan permohonan di OSS; 2 NIK KTP Elektronik; 3 Memiliki email aktif; 4 Nomor Handphone WhatsApp; Persyaratan Teknis: NIB dari OSS; NPWP; 7 Akte Perusahaan; Bota Jumlah Modal Usaha; 9 Data Jumlah Modal Usaha; 9 Data Jumlah Modal Usaha; 10 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 11 Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; Membayar PNBP; 13 Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); PERINGATAN: KUALIFIKASI PELAKSANA: 1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan kekurangan maka berkas di kembalikan 2 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat	KET	ERKAITAN:	PEN	
2 NIK KTP Elektronik; 3 Memiliki email aktif; 4 Nomor Handphone WhatsApp; Persyaratan Teknis: 5 NIB dari OSS; NPWP; 7 Akte Perusahaan; Data Jumlah Modal Usaha; 9 Data jumlah Tenaga Kerja; 10 Peta/ Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 11 Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; 12 Membayar PNBP; 13 Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); PERINGATAN: 1 Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan 2 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan 3 Memiliki kemampuan untuk memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok 4 Nomor Handphone WhatsApp; Persyaratan Teknis:	1			
3 Memiliki email aktif; 4 Nomor Handphone WhatsApp; Persyaratan Teknis : Persyaratan Teknis : 5 NIB dari OSS; 6 NPWP; 7 Akte Perusahaan; Bata Jumlah Modal Usaha; 9 Data Jumlah Modal Usaha; 9 Data Jumlah Tenaga Kerja; 10 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 11 Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; 12 Membayar PNBP; 13 Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); 14 Membayar PNBP; 15 Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); 16 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan 2 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan and memiliki tingkat 1 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat 1 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat 1 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat 1 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat 1 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat 1 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat 1 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat 1 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat 1 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat 1 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat 1 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat 1 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat 1 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat 1 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat 1 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	SOP Pada Seksi Penata Perizinan Muda		
4 Nomor Handphone WhatsApp; Persyaratan Teknis: 5 NIB dari OSS; 6 NPWP; 7 Akte Perusahaan; 8 Data Jumlah Modal Usaha; 9 Data jumlah Tenaga Kerja; 10 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 11 Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; 12 Membayar PNBP; 13 Membayar PNBP; 14 Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan 2 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan dan memiliki tingkat 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat				
Persyaratan Teknis: Persyaratan Teknis: Persyaratan Teknis: NIB dari OSS; NPWP; Akte Perusahaan; Data Jumlah Modal Usaha; Data jumlah Tenaga Kerja; Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan kekurangan maka berkas di kembalikan			3	With the second control of the second contro
5 NIB dari OSS; 6 NPWP; 7 Akte Perusahaan; 8 Data Jumlah Modal Usaha; 9 Data jumlah Tenaga Kerja; 10 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 11 Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; 12 Membayar PNBP; 13 Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); PERINGATAN: KUALIFIKASI PELAKSANA: Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan 5 NIB dari OSS; NPWP; Akte Perusahaan; Data Jumlah Modal Usaha; Deta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); KUALIFIKASI PELAKSANA: Demiliki kemampuan untuk memahami peraturan Ameniliki kemampuan untuk memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat			4	
6 NPWP; 7 Akte Perusahaan; 8 Data Jumlah Modal Usaha; 9 Data jumlah Tenaga Kerja; 10 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 11 Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; 12 Membayar PNBP; 13 Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); PERINGATAN: 1 Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan 2 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat				
7 Akte Perusahaan; 8 Data Jumlah Modal Usaha; 9 Data jumlah Tenaga Kerja; 10 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 11 Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; 12 Membayar PNBP; 13 Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); PERINGATAN: 1 Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan 2 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan 3 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan dan memiliki tingkat			5	
8 Data Jumlah Modal Usaha; 9 Data jumlah Tenaga Kerja; 10 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 11 Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; 12 Membayar PNBP; 13 Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); PERINGATAN: KUALIFIKASI PELAKSANA: 1 Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan 2 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat			6	
9 Data jumlah Tenaga Kerja; 10 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 11 Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; 12 Membayar PNBP; 13 Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); PERINGATAN: 1 Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan 2 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat			7	
10 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 11 Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; 12 Membayar PNBP; 13 Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); 14 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 12 Membayar PNBP; 13 Petimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); 14 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 16 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 12 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 12 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 16 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 16 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 16 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 16 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 16 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 16 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 16 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 16 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 16 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 16 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 16 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 16 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 17 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 18 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 18 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 18 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 18 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 18 Peta/Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 18 Peta/Sketsa y			8	
Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; Membayar PNBP; 13 Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); PERINGATAN: KUALIFIKASI PELAKSANA: Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan kekurangan maka berkas di kembalikan Memiliki kemampuan untuk memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan da			200	
PERINGATAN: Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan Membayar PNBP; 13 Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); KUALIFIKASI PELAKSANA: 1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan 2 Memiliki kemampuan untuk memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat				
PERINGATAN: Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan 13 Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah); KUALIFIKASI PELAKSANA: 1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan 2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat			11	
PERINGATAN: Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan KUALIFIKASI PELAKSANA: 1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan 2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat				
1 Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan 2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok 2 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat			13	Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah);
1 Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan 2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok 2 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat				
1 Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan 2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok 2 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat				
1 Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan 2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok 2 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat				
kekurangan maka berkas di kembalikan 2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok 2 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat			KUA	
2 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat	1		1	
			2	
	2		3	

Persetujuan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku	1	
		Pemohon	Loket FO dan BO	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (KASI dan KABID)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengajukan Permohonan Izin melalui Portal SiCantik Cloud, Jika secara Online mendapatkan bukti penerimaan berkas kelengkapan izin					Permohonan diatas materai 10000 ditu- jukan ke Bupati Cq Ka. DPMPTSP	10 Menit	Data Dokumen yang lengkap dan benar	
2	Menerima Dokumen, Memeriksa kelengka pan persyaratan, Input data/Entri data Perizinan						15 Menit		
3	Memverifikasi, Memeriksa dokumen Per- izinan dan melakukan NotIfikasi melalui SiCantik Cloud sesuai dengan ketentuan yang berlaku			-			1 Jam	Data Verifikasi dan Validasi kebenaran permohonan	
4	Penetapan Izin dan Tanda Tangan Elekto- nik				→		1 Jam		
5	Mencetak Hasil penetapan Izin yang telah tanda tangan elektronik						10 Menit		
6	Penyerahan Dokumen Izin								